

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Akuntansi merupakan pondasi penting dalam keberlanjutan organisasi, baik di sektor publik maupun swasta. Namun, penyalahgunaan prinsip akuntansi, yang dikenal sebagai *fraud*, telah menjadi isu serius di berbagai negara. *Fraud* tidak hanya menimbulkan kerugian finansial yang signifikan tetapi juga merusak integritas organisasi. Dampaknya menjadi lebih kritis pada sektor pemerintahan, karena menyangkut pengelolaan sumber daya publik yang secara langsung memengaruhi pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan rilis (*Association of Certified Fraud Examiners*, 2024) (ACFE) terdapat 1.921 kasus mengenai praktik kecurangan, yang datanya diperoleh dari 138 negara. ACFE juga menuliskan Indonesia berada di peringkat ke-3 sebagai negara dengan jumlah *fraud* sebanyak 25 kasus yang terjadi di tahun 2023. Kecurangan dapat dikategorikan pada 3 kelompok yaitu, Kecurangan Laporan Keuangan (*Financial Statement Fraud*), Penyalahgunaan Aset (*Asset Misappropriation*), dan Korupsi (*Corruption*) (Calsia, 2019). Sektor pemerintahan dan perusahaan negara di Indonesia menjadi sektor yang paling rentan terhadap *fraud*.

*Fraud* Menurut (Faroqui & Nugroho, 2022)

**“Pencegahan *fraud* merupakan tindakan memerangi *fraud* dengan biaya yang murah karena *fraud* (kecurangan) bisa dianalogikan**

**sebagai penyakit, yaitu lebih baik dicegah daripada diobati. Jika menunggu terjadinya *fraud* baru ditangani itu, artinya sudah ada kerugian yang terjadi dan telah dinikmati oleh pihak tertentu, berbeda halnya apabila kita berhasil mencegahnya tentu kerugian belum semuanya beralih ke pelaku *fraud*. Pencegahan kecurangan adalah berupaya untuk menghilangkan atau meminimalkan sebab-sebab timbulnya kecurangan tersebut.”**

Dua elemen penting dalam pembangunan ekonomi adalah industri keuangan dan sektor fiskal. Namun, keduanya kini makin sering diterpa skandal dan kejahanan yang meresahkan masyarakat. Sektor fiskal sendiri merupakan kebijakan keuangan yang dijalankan oleh pemerintah. Pada tingkat daerah, praktik kecurangan atau *fraud* dalam laporan keuangan pemerintah juga sering terjadi. Penyelewengan ini sering kali mencakup praktik *mark-up* anggaran, pengadaan barang dan jasa yang tidak transparan, hingga pelaporan yang direkayasa. Kasus di Jawa Barat, misalnya, menunjukkan bahwa celah regulasi dan tingginya biaya politik sering kali dimanfaatkan untuk tindakan korupsi yang merugikan masyarakat (Atnan, 2014). Fakta ini menunjukkan bahwa permasalahan *fraud* tidak hanya terjadi pada level pemerintah pusat, tetapi juga merambah hingga ke tingkat daerah yang bertanggung jawab langsung terhadap pelayanan publik. Penulis menyajikan kasus-kasus korupsi yang terjadi di dinas pemadam kebakaran (damkar) di Indonesia, berdasarkan data dari berbagai artikel berita terpercaya. Berikut adalah deretan kasusnya;

**Tabel 1. 1**  
**Kasus kecurangan yang terjadi di Dinas Damkar di Indonesia**

No	Kasus	Tahun	Pelaku	Keterangan
1	Pengadaan mobil damkar di 22 daerah di Indonesia	2002 - 2005	Mantan Menteri Dalam Negeri Hari Sabarno, Dirjen Otonomi Daerah Oentarto Sindung Mawardhi, Gubernur Jawa Barat Danny Setiawan, Gubernur Kepri Saleh Djasit & Ismeth Abdullah, Gubernur Kalimantan Selatan Suwarna Abdul Fatah, Wali Kota Makassar Baso Amiruddin Maula, Gubernur Irian Jaya Barat Abraham Octavianus Atururi, Gubernur Maluku Utara Thaib Armain dan direktur PT Sarana Istana Raya Hemgky Samuel Daud.	Penggelembungan harga ( <i>mark-up</i> ) dan suap, serta penunjukan langsung pihak ketiga sebagai pemenang lelang yang diedarkan melalui radiogram kemendagri. Kerugian: Rp 195,4 Miliar.
2	Pengadaan mobil damkar di provinsi Aceh	2017	Dirut dan Komisaris PT Dhezan Karya Perdana, Dheni Okta dan Ratziati Yusri, serta ketua pokja unit layanan pengadaan Aceh Syahrial.	Penggelembungan harga ( <i>mark-up</i> ) dan memenangkan tender tidak sesuai dengan aturan. Kerugian: Rp 17,5 Miliar.
3	Pemotongan gaji untuk iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, serta pengadaan barang dan jasa.	2021	Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Kepala Pengadaan Barang dan jasa, serta Kasubag TU.	Pemotongan gaji yang tidak sesuai aturan, serta <i>mark-up</i> karena kualitas barang yang ada tidak sebanding dengan harganya. Kerugian: Rp 1,1 Miliar

Sumber: penulis mengakses berbagai artikel berita, seperti Detik.com dan Tempo.

Dalam upaya mencegah *fraud*, ada dua elemen utama memainkan peranan penting, yaitu efektivitas pengendalian internal dan penerapan GCG, penelitian ini bertujuan memberikan solusi strategis untuk mengatasi *fraud* di Diskar PB. Sejalan dengan berbagai studi terdahulu, penelitian ini bertujuan untuk menjawab kesenjangan pengetahuan mengenai Efektivitas Pengendalian Internal dan Implementasi *Good corporate governance* (GCG) dalam mencegah *Fraud*, khususnya di organisasi pemerintahan seperti Diskar PB.

Berdasarkan kasus-kasus korupsi yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis merasa perlu melakukan pengamatan awal untuk mengetahui kondisi sebenarnya di lingkungan Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana (Diskar PB). Untuk itu, penulis melakukan pra-survei dengan menyebarluaskan kuesioner sementara kepada 10 pegawai. Kuesioner ini dirancang untuk mengidentifikasi potensi penyimpangan melalui lima indikator utama, yaitu penyelewengan atau pemalsuan data, kesalahan representasi, penyalahgunaan aset, penerapan prinsip akuntansi yang tidak tepat, serta pengelolaan aset yang tidak semestinya. Kelima indikator ini akan diuraikan satu per satu guna memberikan gambaran awal mengenai potensi *fraud* yang mungkin terjadi di dalam dinas, sekaligus menjadi dasar dalam merumuskan arah penelitian lebih lanjut. Berikut diperoleh data dari indicator penyelewengan atau pemalsuan data:

**Tabel 1. 2  
Hasil kuisioner pra-survei mengenai penyelewengan atau pemalsuan data di Diskar PB Kota Bandung.**

<b>No</b>	<b>Pernyataan</b>	<b>Jawaban (%)</b>		<b>Jumlah Pegawai</b>	<b>Target dalam (%)</b>
		<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>		
1	Beberapa laporan keuangan di Diskar PB sering mengandung	60%	40%	10	100

No	Pernyataan	Jawaban (%)		Jumlah Pegawai	Target dalam (%)
		Ya	Tidak		
	data yang tidak akurat karena kurangnya validasi sebelum dipublikasikan.				
2	Sistem pencatatan keuangan sudah diperketat, tetapi masih ada peluang kesalahan input yang tidak disengaja.	60%	40%	10	100

Sumber data: diolah oleh penulis 2025

Hasil pra-survei terhadap 10 pegawai Diskar PB Kota Bandung menunjukkan adanya potensi penyelewengan atau pemalsuan data dalam laporan keuangan. Sebanyak 60% responden setuju bahwa laporan keuangan sering mengandung data tidak akurat akibat kurangnya validasi. Selain itu, 60% responden juga menyatakan bahwa meskipun sistem pencatatan telah diperketat, masih terdapat kemungkinan kesalahan input yang tidak disengaja. Temuan ini mengindikasikan bahwa potensi penyimpangan data masih dirasakan oleh sebagian pegawai, dan menjadi dasar penting untuk dilakukan penelitian lebih lanjut terkait sistem pengendalian internal dan keandalan pelaporan keuangan di Diskar PB. Selanjutnya hasil indikator yang kedua.

**Tabel 1. 3**  
**Hasil kuisioner pra-survei mengenai kesalahan representasi di Diskar PB Kota Bandung.**

No	Pernyataan	Jawaban (%)		Jumlah Pegawai	Target dalam (%)
		Ya	Tidak		
1	Informasi keuangan yang disajikan terkadang dibuat agar terlihat lebih baik daripada kondisi sebenarnya.	40%	60%	10	100
2	Laporan keuangan disusun berdasarkan data yang ada, tetapi terkadang interpretasi yang berbeda dapat menimbulkan kesalahpahaman.	70%	30%	10	100

Sumber data: diolah oleh penulis 2025

Hasil pra-survei mengenai kesalahan representasi di Diskar PB Kota Bandung menunjukkan bahwa 40% responden mengakui informasi keuangan terkadang disusun agar terlihat lebih baik dari kondisi sebenarnya, sementara 60% tidak setuju. Namun, 70% responden menyatakan bahwa meskipun laporan disusun berdasarkan data yang ada, perbedaan interpretasi sering menyebabkan kesalahpahaman. Temuan ini menunjukkan adanya potensi kesalahan representasi, baik yang disengaja maupun tidak, dalam penyajian laporan keuangan. Selanjutnya indicator penyalahgunaan asset.

**Tabel 1. 4  
Hasil kuisioner pra-survei mengenai penyalahgunaan aset di Diskar PB Kota Bandung.**

<b>No</b>	<b>Pernyataan</b>	<b>Jawaban (%)</b>		<b>Jumlah Pegawai</b>	<b>Target dalam (%)</b>
		<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>		
1	Banyak aset Diskar PB yang digunakan untuk kepentingan pribadi tanpa ada pencatatan yang jelas.	50%	50%	10	100
2	Aset Diskar PB dikelola dengan baik, tetapi masih ada barang inventaris yang tidak terpantau secara optimal.	40%	60%	10	100

Sumber data: diolah oleh penulis 2025

Pra-survei mengenai penyalahgunaan aset di Diskar PB Kota Bandung menunjukkan bahwa 50% responden menyatakan aset dinas digunakan untuk kepentingan pribadi tanpa pencatatan yang jelas, sementara 50% lainnya tidak setuju. Selain itu, 40% responden mengakui bahwa masih ada barang inventaris yang tidak terpantau secara optimal meskipun pengelolaan aset dinilai sudah baik. Temuan ini mengindikasikan adanya potensi penyalahgunaan dan lemahnya pengawasan terhadap aset dinas.

**Tabel 1. 5**  
**Hasil kuisioner pra-survei mengenai pengelolaan asset yang tidak semestinya di Diskar PB Kota Bandung.**

<b>No</b>	<b>Pernyataan</b>	<b>Jawaban (%)</b>		<b>Jumlah Pegawai</b>	<b>Target dalam (%)</b>
		<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>		
1	Aset di Diskar PB sering tidak terawat dengan baik dan tidak digunakan sesuai dengan fungsinya.	10%	90%	10	100
2	Pencatatan aset dilakukan dengan rapi, tetapi masih ada aset yang penggunaannya tidak sepenuhnya sesuai dengan fungsinya.	80%	20%	10	100
Sumber data: diolah oleh penulis 2025					

Hasil pra-survei terkait pengelolaan aset yang tidak semestinya di Diskar PB menunjukkan bahwa hanya 10% responden yang menyatakan aset tidak terawat dan tidak digunakan sesuai fungsi, sementara 90% menyatakan tidak. Namun, pada pernyataan kedua, 80% responden mengakui bahwa meskipun pencatatan sudah rapi, penggunaan aset belum sepenuhnya sesuai fungsinya. Hal ini menunjukkan masih adanya kendala dalam pemanfaatan aset secara optimal meskipun administrasi pencatatan dinilai baik.

Berdasarkan hasil pra-survei terhadap berbagai bentuk potensi *fraud* di Diskar PB, terlihat bahwa masih terdapat kelemahan dalam keakuratan data, representasi informasi, serta pengelolaan dan pemanfaatan aset. Temuan ini menunjukkan bahwa risiko penyimpangan masih cukup tinggi jika tidak diimbangi dengan sistem pengawasan yang memadai. Oleh karena itu, penelitian ini selanjutnya akan membahas variabel pengendalian internal sebagai salah satu mekanisme penting dalam mencegah dan meminimalkan terjadinya *fraud* di lingkungan organisasi sektor publik seperti Diskar PB.

*Fraud* dipengaruhi oleh efektivitas sistem pengendalian internal, ketataan aturan akuntansi dan implementasi *good corporate governance* (Novyarni, Arianti, Harni, et al., 2023). Unsur yang sangat diperlukan untuk melancarkan seluruh operasional kegiatan adalah pengendalian internal.

Pengendalian Internal menurut (Ayem & Kusumasari, 2020) menerangkan bahwa, suatu proses yang dilakukan untuk memberi keyakinan yang memadai bahwasanya tujuan pengendalian sudah diwujudkan. Sistem pengendalian internal yang efektif akan mengurangi peluang tindakan curang dengan menciptakan mekanisme pengawasan yang transparan dan berfungsi dengan baik. Ini diperlukan untuk mengurangi kemungkinan tindakan curang yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab di dalam proses pengambilan keputusan. Sistem manajemen yang efektif dapat menurunkan risiko terjadinya *fraud*. Kasus pemotongan gaji untuk iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan serta pengadaan barang dan jasa pada tahun 2021 menunjukkan adanya kelemahan dalam efektivitas pengendalian internal. Pemotongan gaji yang tidak sesuai aturan mencerminkan kurangnya sistem pengawasan dalam administrasi keuangan. Selain itu, praktik mark-up dalam pengadaan barang dan jasa menunjukkan bahwa sistem pengendalian terhadap kualitas dan harga barang masih lemah, sehingga menimbulkan potensi kerugian keuangan. Ada tiga prinsip dasar pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi (Rahayu & Putra, 2022).

Sebagai tindak lanjut dari hasil pra-survei variabel *fraud* yang menunjukkan adanya potensi penyimpangan dalam pelaporan dan pengelolaan aset di Diskar PB, diperlukan pula pengamatan terhadap efektivitas pengendalian

internal. Untuk itu, penulis melakukan pra-survei lanjutan kepada 10 pegawai Diskar PB dengan menggunakan lima indikator, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, pengawasan, serta informasi dan komunikasi. Hal ini bertujuan untuk menilai sejauh mana sistem pengendalian internal yang ada mampu memitigasi risiko *fraud* dalam operasional dinas.

**Tabel 1. 6**  
**Hasil kuisioner pra-survei mengenai lingkungan pengendalian di Diskar PB**  
**Kota Bandung.**

<b>No</b>	<b>Pernyataan</b>	<b>Jawaban (%)</b>		<b>Jumlah Pegawai</b>	<b>Target dalam (%)</b>
		<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>		
1	Aturan dan kebijakan pengendalian internal di Diskar PB sering diabaikan karena dianggap tidak relevan dengan kondisi kerja.	10%	90%	10	100
2	Beberapa kebijakan pengendalian internal di Diskar PB diterapkan, tetapi belum semua pegawai memahami pentingnya aturan tersebut.	80%	20%	10	100
Sumber data: diolah oleh penulis 2025					

Hasil pra-survei mengenai lingkungan pengendalian di Diskar PB menunjukkan bahwa hanya 10% responden yang menyatakan aturan pengendalian sering diabaikan karena dianggap tidak relevan, sementara 90% menyatakan tidak. Namun, 80% responden mengakui bahwa meskipun kebijakan pengendalian telah diterapkan, belum semua pegawai memahami pentingnya aturan tersebut. Ini mengindikasikan perlunya peningkatan pemahaman dan internalisasi kebijakan di lingkungan kerja.

**Tabel 1. 7**  
**Hasil kuisioner pra-survei mengenai penilaian risiko di Diskar PB Kota Bandung.**

<b>No</b>	<b>Pernyataan</b>	<b>Jawaban (%)</b>		<b>Jumlah Pegawai</b>	<b>Target dalam (%)</b>
		<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>		
1	Diskar PB jarang melakukan identifikasi risiko sehingga banyak potensi penyimpangan tidak terdeteksi lebih awal.	20%	90%	10	100
2	Penilaian risiko di Diskar PB dilakukan secara berkala, tetapi belum jelas apakah hasilnya benar-benar berdampak pada pengambilan keputusan.	40%	60%	10	100

Sumber data: diolah oleh penulis 2025

Berdasarkan hasil kuisioner pra-survei terhadap pegawai Diskar PB Kota Bandung, mayoritas responden menilai bahwa proses identifikasi dan penilaian risiko di instansi tersebut masih belum berjalan optimal. Sebanyak 80% responden menyatakan bahwa identifikasi risiko jarang dilakukan, sehingga berpotensi menyebabkan penyimpangan yang tidak terdeteksi sejak awal. Selain itu, meskipun penilaian risiko dilakukan secara berkala, 60% responden menyebutkan bahwa hasil dari penilaian tersebut belum jelas apakah benar-benar berdampak pada pengambilan keputusan. Hal ini mengindikasikan perlunya peningkatan efektivitas dalam pengelolaan risiko di lingkungan Diskar PB.

**Tabel 1. 8**  
**Hasil kuisioner pra-survei mengenai aktivitas pengendalian di Diskar PB Kota Bandung.**

<b>No</b>	<b>Pernyataan</b>	<b>Jawaban (%)</b>		<b>Jumlah Pegawai</b>	<b>Target dalam (%)</b>
		<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>		
1	Dalam praktiknya, banyak transaksi yang dilakukan tanpa persetujuan berjenjang sehingga	30%	70%	10	100

No	Pernyataan	Jawaban (%)		Jumlah Pegawai	Target dalam (%)
		Ya	Tidak		
	sistem pengendalian menjadi lemah.				
2	Sistem pengendalian sudah diterapkan di Diskar PB, tetapi masih ada celah bagi beberapa transaksi yang tidak terpantau sepenuhnya.	80%	20%	10	100

Sumber data: diolah oleh penulis 2025

Hasil kuisioner pra-survei mengenai aktivitas pengendalian di Diskar PB Kota Bandung menunjukkan bahwa mayoritas responden menilai sistem pengendalian internal belum berjalan secara optimal. Sebanyak 70% responden menyatakan tidak setuju bahwa banyak transaksi dilakukan tanpa persetujuan berjenjang, artinya sebagian besar meyakini prosedur formal masih dijalankan. Namun, pada pernyataan kedua, 80% responden menyatakan setuju bahwa meskipun sistem pengendalian telah diterapkan, masih terdapat celah yang menyebabkan beberapa transaksi tidak terpantau sepenuhnya. Hal ini mengindikasikan bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan sistem masih perlu diperkuat.

**Tabel 1. 9**  
**Hasil kuisioner pra-survei mengenai pengawasan di Diskar PB Kota Bandung.**

No	Pernyataan	Jawaban (%)		Jumlah Pegawai	Target dalam (%)
		Ya	Tidak		
1	Pengawasan yang dilakukan di Diskar PB lebih bersifat formalitas tanpa adanya tindakan korektif yang nyata.	50%	50%	10	100
2	Pengawasan terhadap keuangan sudah dilakukan, tetapi terkadang hasil audit tidak langsung ditindaklanjuti.	30%	70%	10	100

Sumber data: diolah oleh penulis 2025

Hasil kuisioner pra-survei mengenai pengawasan di Diskar PB Kota Bandung menunjukkan adanya pandangan yang cukup terbagi di kalangan responden. Sebanyak 50% responden menilai pengawasan di Diskar PB hanya bersifat formalitas tanpa adanya tindakan korektif yang nyata. Selain itu, 70% responden menyatakan bahwa meskipun pengawasan terhadap keuangan telah dilakukan, hasil audit sering kali tidak ditindaklanjuti. Temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan masih perlu ditingkatkan, baik dari sisi pelaksanaan maupun tindak lanjut hasil pengawasan.

**Tabel 1. 10**  
**Hasil kuisioner pra-survei mengenai informasi dan komunikasi di Diskar PB Kota Bandung.**

No	Pernyataan	Jawaban (%)		Jumlah Pegawai	Target dalam (%)
		Ya	Tidak		
1	Banyak pegawai tidak mengetahui kebijakan pengendalian internal karena kurangnya komunikasi dari manajemen.	20%	80%	10	100
2	Komunikasi mengenai kebijakan pengendalian internal cukup terbuka, tetapi tidak semua pegawai aktif mencari tahu detailnya.	60%	40%	10	100

Sumber data: diolah oleh penulis 2025

Berdasarkan hasil kuisioner pra-survei di Diskar PB Kota Bandung, mayoritas responden menyatakan bahwa komunikasi terkait kebijakan pengendalian internal masih belum efektif. Sebanyak 80% responden tidak setuju bahwa kurangnya komunikasi dari manajemen menjadi penyebab pegawai tidak mengetahui kebijakan pengendalian, yang mengindikasikan komunikasi dari manajemen sudah ada. Namun, 60% responden menyatakan bahwa meskipun

informasi disampaikan secara terbuka, tidak semua pegawai aktif mencari tahu lebih dalam. Hal ini menunjukkan bahwa perlu ada upaya lebih lanjut untuk mendorong partisipasi dan pemahaman pegawai terhadap informasi yang sudah tersedia.

Selain pengendalian internal, penerapan *good corporate governance* (GCG) merupakan elemen kunci untuk mencegah *fraud* di organisasi pemerintahan. GCG bertujuan untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, kewajaran, dan tanggung jawab diterapkan secara konsisten dalam pengelolaan organisasi. *Good corporate governance* (GCG) merupakan suatu tata kelola organisasi secara baik dalam melakukan pengelolaan sumber daya organisasi secara efektif, efisien, ekonomis, dan produktif dengan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independen, dan adil dalam rangka mencapai tujuan perusahaan (Abdurrahman, 2021). Tanpa penerapan GCG yang baik, risiko penyalahgunaan kewenangan dan manipulasi keuangan menjadi semakin tinggi. Kasus pengadaan mobil pemadam kebakaran di 22 daerah Indonesia pada tahun 2002–2005 serta di Provinsi Aceh pada tahun 2017, mencerminkan buruknya penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pelanggaran prosedur dalam proses pengadaan.

Setelah mengidentifikasi kondisi pengendalian internal dan indikasi *fraud* melalui pra-survei, tahapan selanjutnya difokuskan pada variabel *Good corporate governance* (GCG). Evaluasi terhadap penerapan prinsip-prinsip GCG menjadi penting untuk melihat sejauh mana tata kelola yang baik dapat mendukung

efektivitas pengendalian internal serta meminimalkan potensi *fraud* di lingkungan Diskar PB Kota Bandung.

**Tabel 1. 11  
Hasil kuisioner pra-survei mengenai transparansi di Diskar PB Kota Bandung.**

<b>No</b>	<b>Pernyataan</b>	<b>Jawaban (%)</b>		<b>Jumlah Pegawai</b>	<b>Target dalam (%)</b>
		<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>		
1	Diskar PB tidak memiliki mekanisme untuk memastikan bahwa masyarakat dapat dengan mudah mengakses laporan keuangan.	90%	10%	10	100
2	Informasi keuangan Diskar PB tersedia untuk publik, tetapi masih ada keterbatasan akses bagi masyarakat yang ingin mengkajinya lebih dalam.	60%	40%	10	100

Sumber data: diolah oleh penulis 2025

Hasil kuisioner pra-survei mengenai transparansi di Diskar PB Kota Bandung menunjukkan bahwa sebagian besar responden menilai akses informasi keuangan masih terbatas. Sebanyak 90% responden menyatakan bahwa tidak ada mekanisme yang memastikan masyarakat dapat dengan mudah mengakses laporan keuangan, dan 60% menyatakan bahwa meskipun informasi tersedia, aksesnya masih terbatas bagi publik yang ingin mempelajari lebih lanjut. Temuan ini mengindikasikan bahwa aspek transparansi, khususnya dalam penyampaian informasi keuangan kepada publik, perlu diperbaiki untuk mendukung prinsip Good Corporate Governance.

**Tabel 1. 12**  
**Hasil kuisioner pra-survei mengenai akuntabilitas di Diskar PB Kota Bandung.**

<b>No</b>	<b>Pernyataan</b>	<b>Jawaban (%)</b>		<b>Jumlah Pegawai</b>	<b>Target dalam (%)</b>
		<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>		
1	Tanggung jawab dalam penggunaan anggaran di Diskar PB sering kali tidak jelas, menyebabkan kesulitan dalam audit keuangan.	0%	100%	10	100
2	Diskar PB berusaha menerapkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan, tetapi ada beberapa kasus yang tidak terselesaikan secara terbuka.	20%	80%	10	100

Sumber data: diolah oleh penulis 2025

Berdasarkan hasil kuisioner pra-survei mengenai akuntabilitas di Diskar PB Kota Bandung, mayoritas responden menunjukkan pandangan positif. Seluruh responden (100%) menilai bahwa penggunaan anggaran sudah cukup jelas dan tidak menimbulkan kesulitan dalam proses audit. Selain itu, sebagian besar responden (80%) juga menyatakan bahwa tidak ada kasus keuangan yang belum terselesaikan secara terbuka, yang menunjukkan adanya upaya nyata dalam menerapkan prinsip akuntabilitas di lingkungan Diskar PB.

**Tabel 1. 13**  
**Hasil kuisioner pra-survei mengenai tanggungjawab di Diskar PB Kota Bandung.**

<b>No</b>	<b>Pernyataan</b>	<b>Jawaban (%)</b>		<b>Jumlah Pegawai</b>	<b>Target dalam (%)</b>
		<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>		
1	Sebagian pegawai cenderung menghindari tanggung jawab atas kesalahan dalam pengelolaan anggaran.	0%	100%	10	100
2	Setiap unit memiliki tanggung jawab atas penggunaan anggaran, tetapi tidak semua pertanggungjawaban	20%	80%	10	100

No	Pernyataan	Jawaban (%)		Jumlah Pegawai	Target dalam (%)
		Ya	Tidak		
	didokumentasikan secara sistematis.				
Sumber data: diolah oleh penulis 2025					

Berdasarkan hasil kuisioner pra-survei mengenai tanggung jawab di Diskar PB Kota Bandung, responden memberikan tanggapan yang positif. Seluruh responden (100%) menyatakan tidak setuju bahwa pegawai cenderung menghindari tanggung jawab atas kesalahan dalam pengelolaan anggaran, yang menunjukkan adanya budaya tanggung jawab yang baik di lingkungan kerja. Selain itu, sebanyak 80% responden menilai bahwa pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran telah didokumentasikan secara sistematis di setiap unit. Temuan ini mengindikasikan bahwa mekanisme tanggung jawab dan dokumentasi di Diskar PB telah berjalan dengan cukup baik.

**Tabel 1. 14**  
**Hasil kuisioner pra-survei mengenai independensi di Diskar PB Kota Bandung.**

No	Pernyataan	Jawaban (%)		Jumlah Pegawai	Target dalam (%)
		Ya	Tidak		
1	Keputusan keuangan di Diskar PB sering dipengaruhi oleh pihak luar yang tidak berkepentingan langsung dengan operasional dinas.	0%	100%	10	100
2	Keputusan keuangan diambil secara independen, tetapi terkadang ada intervensi yang sulit dihindari.	40%	60%	10	100
Sumber data: diolah oleh penulis 2025					

Berdasarkan hasil kuisioner pra-survei mengenai independensi di Diskar PB Kota Bandung, seluruh responden (100%) menyatakan bahwa keputusan keuangan tidak dipengaruhi oleh pihak luar yang tidak berkepentingan langsung,

menandakan tingkat independensi yang kuat dalam pengambilan keputusan. Selain itu, meskipun sebagian responden (40%) menyebut masih terdapat potensi intervensi, mayoritas (60%) menilai bahwa keputusan keuangan telah diambil secara independen. Secara keseluruhan, hasil ini mencerminkan bahwa Diskar PB telah menunjukkan kemandirian yang cukup baik dalam pengelolaan keuangannya.

**Tabel 1. 15**  
**Hasil kuisioner pra-survei mengenai keadilan di Diskar PB Kota Bandung.**

<b>No</b>	<b>Pernyataan</b>	<b>Jawaban (%)</b>		<b>Jumlah Pegawai</b>	<b>Target dalam (%)</b>
		<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>		
1	Alokasi anggaran di Diskar PB sering lebih menguntungkan beberapa unit tertentu dibandingkan yang lain, tanpa pertimbangan objektif.	10%	90%	10	100
2	Alokasi anggaran dilakukan dengan prinsip kesetaraan, tetapi dalam praktiknya ada unit tertentu yang mendapatkan prioritas lebih.	90%	60%	10	100
Sumber data: diolah oleh penulis 2025					

Hasil kuisioner pra-survei mengenai keadilan di Diskar PB Kota Bandung menunjukkan bahwa mayoritas responden menilai proses alokasi anggaran sudah berjalan secara objektif dan adil. Hal ini tercermin dari 90% responden yang tidak setuju bahwa ada unit yang lebih diuntungkan tanpa pertimbangan yang jelas. Pada pernyataan kedua, meskipun alokasi anggaran secara prinsip dilakukan dengan asas kesetaraan, 40% responden menyatakan bahwa dalam praktiknya terdapat unit-unit tertentu yang mendapat prioritas lebih. Hal ini dapat dipahami mengingat Diskar PB merupakan dinas yang bergerak di bidang kedaruratan, di mana kondisi kegawatdaruratan sering kali menuntut penyesuaian alokasi anggaran secara cepat dan terfokus. Unit-unit yang berhubungan langsung

dengan penanganan kejadian darurat otomatis akan menjadi prioritas utama agar pelayanan dapat berjalan secara optimal dan responsif terhadap kebutuhan mendesak

Mengingat peran strategis Diskar PB dalam menjaga keamanan masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang relevan untuk meningkatkan pengelolaan dana publik secara akuntabel. Dengan demikian, Diskar PB dapat berkontribusi dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap kinerja instansi pemerintah sekaligus menjadi model bagi dinas lain dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan anggaran publik. Efektivitas pengendalian internal yang kuat akan mencegah peluang terjadinya *fraud* dan implementasi GCG akan menciptakan budaya transparansi yang mendukung pengawasan eksternal maupun internal.

Skripsi ini berjudul "*Efektivitas Pengendalian Internal dan Implementasi Good corporate governance dalam mencegah Fraud: Suatu Survei pada Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung*" secara langsung mencerminkan bagaimana kedua variabel tersebut bekerja secara simultan untuk mencegah *fraud*. Variabel – variabel tersebut bekerjasama untuk menciptakan sistem yang saling melengkapi dalam mencegah *fraud*. Kombinasi dari pengendalian internal yang kuat dan penerapan tata kelola yang baik diharapkan dapat menciptakan sistem pengawasan yang optimal di Diskar PB. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam mendukung Diskar PB untuk meningkatkan tata kelola keuangan yang lebih baik dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap instansi pemerintah.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian di atas dapat dipersempit dalam identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Tidak efektifnya kontrol internal pengelola dana menjadikan peluang terjadinya *fraud*.
2. Penerapan *Good corporate governance* (GCG) yang belum menjadi budaya memberikan peluang terjadinya *fraud*.
3. Penguatan mekanisme efektivitas pengendalian internal dan implementasi GCG untuk mendeteksi dan mencegah *fraud*.

## 1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, dapat ditemukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh efektivitas pengendalian internal dalam mencegah *fraud* di Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana (Diskar PB).
2. Seberapa besar pengaruh implementasi *good corporate governance* (GCG) dalam mencegah *fraud* di Diskar PB.
3. Seberapa besar pengaruh efektivitas pengendalian internal dan implementasi *good corporate governance* secara simultan dalam mencegah *fraud*.

## 1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan:

1. Pengaruh efektivitas pengendalian internal dalam mencegah *fraud* di Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana (Diskar PB).
2. Pengaruh implementasi *good corporate governance* (GCG) dalam mencegah *fraud* di Diskar PB.
3. Pengaruh efektivitas pengendalian internal dan implementasi *Good corporate governance* secara simultan dalam mencegah *fraud*.

## 1.5 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat mencapai tujuan sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Dengan begitu penelitian ini dapat memberikan manfaat yang positif bagi berbagai pihak yang berkepentingan. Adapun manfaat yang diharapkan antara lain:

### 1.5.1 Kegunaan Teoritis

1. Penelitian ini dapat memperluas wawasan akademik, khususnya terkait efektivitas pengendalian internal dan implementasi *Good corporate governance* dalam mencegah *fraud*, sehingga memperkaya literatur penelitian di bidang ini.
2. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi berharga bagi peneliti lain yang berminat mendalami efektivitas pengendalian internal dan implementasi *Good corporate governance* dalam mencegah *fraud* untuk konteks yang lebih luas.

### 1.5.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi organisasi, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk mendukung manajemen dalam menyusun kebijakan internal yang lebih efektif dan berorientasi pada pencegahan *fraud*.
2. Untuk masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tambahan tentang pentingnya efektivitas pengendalian internal dan implementasi *Good corporate governance* dalam mencegah *fraud* yang merugikan.

## 1.6 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

Kerangka pemikiran dan hipotesis dipecah kembali menjadi sub bab masing – masing, yang diantaranya:

### 1.6.1 Landasan Teori

Pengendalian Internal menurut (Ayem & Kusumasari, 2020) merupakan suatu proses yang dilakukan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan pengendalian telah diwujudkan. Sistem pengendalian internal yang efektif dapat mengurangi peluang tindakan curang dengan menciptakan mekanisme pengawasan yang transparan dan berfungsi dengan baik.

*Good corporate governance* (GCG) merupakan suatu tata kelola organisasi secara baik dalam melakukan pengelolaan sumber daya organisasi secara efektif, efisien, ekonomis, dan produktif dengan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independen, dan adil dalam rangka mencapai tujuan perusahaan (Abdurrahman, 2021).

*Fraud* Menurut (Farochi & Nugroho, 2022)

“Pencegahan *fraud* merupakan tindakan memerangi *fraud* dengan biaya yang murah karena *fraud* (kecurangan) bisa dianalogikan sebagai penyakit, yaitu lebih baik dicegah daripada diobati. Jika menunggu terjadinya *fraud* baru ditangani itu, artinya sudah ada kerugian yang terjadi dan telah dinikmati oleh pihak tertentu, berbeda halnya apabila kita berhasil mencegahnya tentu kerugian belum semuanya beralih ke pelaku *fraud*. Pencegahan kecurangan adalah berupaya untuk menghilangkan atau meminimalkan sebab-sebab timbulnya kecurangan tersebut.”

Penulis menggunakan dua variabel independen dan satu varibel dependen. Variabel independen yang dianalisis meliputi efektivitas pengendalian internal ( $X_1$ ) dan implementasi *good corporate governance* ( $X_2$ ). Dan yang menjadi variabel dependennya adalah *fraud* ( $Y$ ). Hubungan antarvariabel dalam penelitian ini didasarkan pada teori agensi. Teori agensi menjelaskan adanya konflik kepentingan antara *principal* (pihak pemberi wewenang) dan *agent* (pihak penerima wewenang), yang berpotensi memunculkan kecurangan (*fraud*). Efektivitas pengendalian internal ( $X_1$ ) dan implementasi GCG ( $X_2$ ) merupakan mekanisme yang dirancang untuk meminimalkan konflik kepentingan tersebut. Dengan adanya mekanisme ini, peluang terjadinya *fraud* ( $Y$ ) dalam organisasi dapat dikurangi secara signifikan.

### 1.6.2 Penelitian Terdahulu

Banyak sekali penelitian yang telah dilakukan akan tetapi dengan seiring berjalannya waktu dan perkembangan jaman, *research* harus tetap dilakukan untuk kajian terkini. Penelitian di bawah ini menjadi bahan acuan penulis untuk pemaparan yang akan disajikan.

**Tabel 1. 16**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti & Tahun	Variabel	Metode	Hasil Penelitian
1	(Rahayu & Putra, 2022)	<b>Independen:</b> Ketaatan aturan akuntansi, kompetensi SDM, efektivitas pengendalian internal, dan <i>Good corporate governance</i>  <b>Dependen:</b> Kecenderungan Kecurangan Akuntansi	Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif memanfaatkan sampel purposive sampling serta menerapkan analisis regresi linear berganda.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketaatan aturan akuntansi berpengaruh positif dengan nilai signifikansi sebesar 0,002.</li> <li>• Kompetensi SDM berpengaruh negatif dengan nilai signifikansi sebesar -0,220.</li> <li>• efektivitas pengendalian internal berpengaruh positif dengan nilai signifikansi sebesar 0,024.</li> <li>• <i>Good corporate governance</i> berpengaruh positif dengan nilai signifikansi sebesar 0,005.</li> </ul>
2	(Novyarni, Arianti, Harni, et al., 2023)	<b>Independen:</b> Efektivitas pengendalian internal, ketaatan aturan akuntansi, dan implementasi <i>Good corporate governance</i> .  <b>Dependen:</b> <i>Fraud</i>	Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif memanfaatkan sampel purposive sampling serta menerapkan analisis regresi linear berganda.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengaruh efektivitas sistem pengendalian internal terhadap <i>fraud</i> di masa pandemi Covid-19 berpengaruh positif dengan nilai signifikansi sebesar 0,040.</li> <li>• Pengaruh ketaatan aturan akuntansi terhadap <i>fraud</i> di masa pandemi Covid-19 berpengaruh positif dengan nilai signifikansi sebesar 0,028.</li> <li>• Pengaruh implementasi <i>good corporate governance</i> terhadap <i>fraud</i> di masa pandemi Covid-19 berpengaruh positif dengan nilai signifikansi sebesar 0,000.</li> </ul>

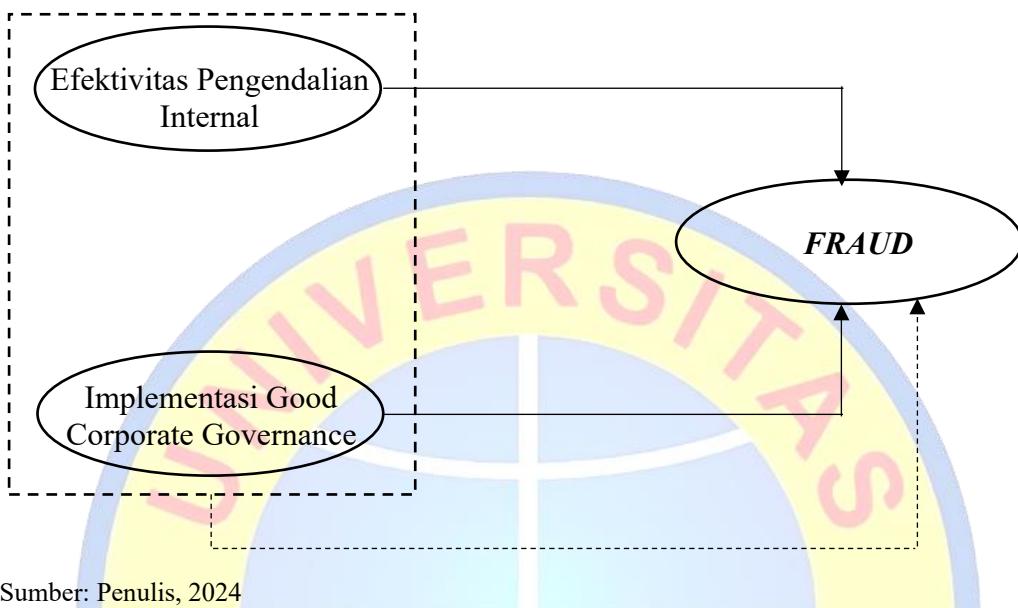
No	Peneliti & Tahun	Variabel	Metode	Hasil Penelitian
				<ul style="list-style-type: none"> <li>Efektivitas sistem pengendalian internal, ketaatan aturan akuntansi, implementasi <i>good corporate governance</i> berpengaruh secara simultan terhadap <i>fraud</i> di masa pandemi covid-19 berpengaruh simultan dengan nilai signifikansi sebesar 0,05.</li> </ul>
3	(Fauziah & Pohan, 2024)	<b>Independen:</b> Pengendalian internal, sistem informasi akuntansi, audit internal dan <i>Good corporate governance</i>  <b>Dependen:</b> Pencegahan Kecurangan	Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif memanfaatkan sampel purposive sampling serta menerapkan analisis regresi linear berganda.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan dengan standar deviasi sebesar 0.90.</li> <li>sistem informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan dengan standar deviasi sebesar 1.071,</li> <li>audit internal berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan dengan standar deviasi 0.985,</li> <li><i>Good corporate governance</i> berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan dengan standar deviasi 0.961.</li> </ul>
4	(Damayanti & Primastiwi, 2021)	<b>Independen:</b> Pengendalian internal, <i>Good corporate governance</i> dan sistem pengukuran kinerja  <b>Dependen:</b>	Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif memanfaatkan sampel purposive sampling serta menerapkan analisis	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nilai koefisien pengendalian internal (X1) yaitu sebesar 0,085 dan bertanda positif, artinya jika variabel pengendalian internal (X1) meningkat satu satuan, maka pencegahan <i>fraud</i> (Y) meningkat sebesar 0,085.</li> </ul>

No	Peneliti & Tahun	Variabel	Metode	Hasil Penelitian
		Pencegahan <i>fraud.</i>	regresi linear berganda.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nilai koefisien <i>good corporate governance</i> (X2) yaitu sebesar 0,514 dan bertanda positif, artinya jika variabel <i>good corporate governance</i> (X2) meningkat satu satuan, maka pencegahan <i>fraud</i> (Y) meningkat sebesar 0,514.</li> <li>Nilai koefisien sistem pengukuran kinerja (X2) yaitu sebesar 0,546 dan bertanda positif, artinya jika variabel sistem pengukuran kinerja (X2) meningkat satu satuan, maka pencegahan <i>fraud</i> (Y) meningkat sebesar 0,546.</li> <li>variabel pengendalian internal, <i>good corporate governance</i>, dan sistem pengukuran kinerja secara simultan berpengaruh terhadap variabel pencegahan terjadinya <i>fraud</i>.</li> </ul>

### 1.6.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran yang dirancang berangkat dari latar belakang permasalahan *fraud* yang semakin kompleks di sektor pemerintahan. *Fraud*, yang dapat berupa kecurangan laporan keuangan, penyalahgunaan aset, atau korupsi, memberikan dampak buruk tidak hanya pada keuangan negara tetapi juga pada kepercayaan masyarakat terhadap integritas institusi publik. Kasus pengadaan

mobil damkar di atas, menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan pemerintah masih memiliki banyak celah.



**Gambar 1. 1  
Kerangka Pemikiran**

Keterangan:

- Garis lurus penghubung secara parsial = pengujian variabel secara parsial (pengaruh masing – masing variabel bebas terhadap variabel terikat)
- Garis putus – putus penghubung secara simultan = pengujian variabel secara simultan (pengaruh secara bersama – sama variabel bebas dengan variabel terikat)

### 1) Hubungan Efektivitas Pengendalian Internal dengan *Fraud*

Efektivitas pengendalian internal berperan dalam mencegah *fraud* dengan menerapkan kebijakan, prosedur, dan mekanisme pengawasan yang ketat. Sistem yang kuat mampu mendeteksi penyimpangan lebih dini, sementara kelemahan dalam pengendalian internal membuka peluang manipulasi tanpa terdeteksi.

## 2) Hubungan Implementasi *Good corporate governance* (GCG) dengan *Fraud*

Implementasi *Good corporate governance* (GCG) yang baik menciptakan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berintegritas, sehingga dapat menekan potensi kecurangan. Sebaliknya, lemahnya penerapan GCG meningkatkan risiko *fraud* akibat kurangnya kontrol dan mekanisme pertanggungjawaban.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa *fraud* dalam suatu organisasi dapat ditekan melalui tiga faktor utama: efektivitas pengendalian internal dan implementasi GCG. Jika kedua aspek ini diterapkan dengan optimal, maka potensi terjadinya *fraud* akan berkurang secara signifikan. Namun, jika salah satu atau bahkan keduanya lemah, maka risiko *fraud* akan semakin besar, yang dapat berdampak buruk terhadap keberlanjutan organisasi. Oleh karena itu, untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari *fraud*, organisasi perlu memperkuat sistem pengendalian internal serta menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik secara menyeluruh.

### 1.6.4 Hipotesis

Hipotesis penelitian merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang bersumber dari teori yang relevan dan perlu divalidasi melalui analisis data empiris. Hipotesis ini dibangun berdasarkan kerangka berpikir yang berasal dari teori dan dirumuskan dalam bentuk pernyataan (Iba & Wardhana, 2023).

*Agency Theory* menyoroti pentingnya mekanisme kontrol untuk meminimalkan risiko perilaku oportunistik oleh *agent*, termasuk risiko terjadinya *fraud*. Dalam konteks ini, efektivitas pengendalian internal dan implementasi GCG berperan sebagai alat mitigasi untuk mengurangi *information asymmetry* dan memastikan bahwa tindakan *agent* sejalan dengan kepentingan *principal*. Oleh karena itu, penulis merumuskan hipotesis yang akan digunakan untuk menganalisis hubungan antar variabel tersebut, yaitu:

- **Hipotesis1:** Efektivitas pengendalian internal secara parsial memiliki pengaruh signifikan dalam pencegahan *fraud*.
- **Hipotesis2:** Implementasi *good corporate governance* (GCG) secara parsial memiliki pengaruh signifikan dalam pencegahan *fraud*.
- **Hipotesis3:** Efektivitas pengendalian internal dan implementasi *good corporate governance* (GCG) secara parsial dan simultan memiliki pengaruh signifikan dalam pencegahan *fraud* di sektor pemerintahan.

## 1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian

### 1.7.1 Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data sehubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam penyusunan skripsi ini, maka lokasi penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung, yang berlokasi di Jl. Sukabumi No. 17, Kelurahan Kacapiring, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung 40271 Provinsi Jawa Barat.

### 1.7.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan dimulai dari bulan Oktober tahun 2024. Jadwal pelaksanaan penelitian ini direncanakan sebagai berikut:

**Tabel 1. 17**  
**Waktu Penelitian**

No	Jenis Kegiatan	Bulan							
		Okt-2024	Nov-2024	Des-2024	Jan-2025	Feb-2025	Mar-2025	Apr-2025	Mei-2025
1	Pengajuan judul dan penetapan judul penelitian								
2	Bimbingan SUP Bab I s.d Bab III								
3	Seminar Usulan Proposal (SUP)								
4	Revisi SUP								
5	Penyebaran Kuesioner								
6	Bimbingan Skripsi Bab IV dan V								
7	Sidang Akhir Skripsi								
8	Revisi Sidang Akhir Skripsi								

